

DAFTAR PUSTAKA

Adam, S. (2019). FUNGSI KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. *Jurnal Belo Volume 4* , 12.

Ainal Hadi. S.H., M. M. (2012). *Kriminologi dan Viktimologi*. Banda Aceh : CV. BINA NANGROE.

Ali Imron, S. M. (2019). *HUKUM PEMBUKTIAN*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.

Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anatomi Muliawan, C. C. (2010). EFEKTIVITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI. *Lex Jurnalica Vol. 7 No.2* , 11-12.

Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotarian Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Ariawan, I. G. (2013). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF. *E-Journal Universitas Panji Sakti* , 6-8.

Asikin, A. d. (2006). *Pengantar Metode Peneleitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asprianti. (2017). KEDUDUKAN SAKSI DE AUDITU DALAM PRAKTIK PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA. *ejournal.unsrat.ac.id* , 5.

Bahrn. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* , 8-10.

Bakhri, S. (2012). *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, hal. 16. Jakarta: Gramata Publishing.

Bakhri, S. (2009). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Bangkut, N. S. (2019). KAJIAN YURIDIS GELAR PERKARA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 2* , 3-6.

Chazawi, A. (2006). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Bandung: Alumni* , 5-6.

Chazawi, A. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Damanik, Y. G. (2015). KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. *Yanel's%20Garsione%20Damanik* , 66-67.

Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Dian Varesa, R. A. (2021). VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* , 6.

DIDIK PRAMONO, S. (2016). GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN HUBUNGANNYA DENGAN PRAPERADILAN. *TESIS* , 10.

Dr. H. Achmad Sulchan, S. (2021). *HUKUM ACARA PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PRAKTEK BERACARA*. Semarang: Unissula Press.

Dr. Moh. Hatta, S. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Galang Press.

Dr. Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Dr. Munir Fuady, S. (2020). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Afitya Bakti.

Dr. Munir Fuady, S. (2020). *TEORI HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA DAN PERDATA*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI BANDUNG 2020.

EkaPutra, M. (2017). *Dasa--dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: USSU PRESS.

Eleanora, F. N. (2016). Eleanora, F. N. (2016). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Penyuapan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* .

Fajar Sudariyanto, H. W. (2021). ANALISIS GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN. *Jurnal Syntax Transformation* , 8.

Falah, M. F. (2017). Falah, M. F., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. S. (2017). Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID. B/2014/PN. BDG. *Lentera Hukum* .

Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghina Alifah, E. J. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Bandung Conference Series: Law Studies* , 5.

Hafid, A. (2015). KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KUHP. *Lex Crimen Vol. IV/No. 4* , 3-4.

Halif, E. I. (2021). UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Yudisial* , 7-10.

Hamzah, A. (2004). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalla Indonesia.

Hamzah, P. D. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Y. M. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. (2020). *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: PENERBIT EIRLANGGA.

Ihsani, A. N. (2017). Urgensi Perluasan Objek Praperadilan dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka. *LEGAL STANDING* , 4-6.

Irfan Maulana Muharikin, D. P. (2015). *KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS NON SELF INCRIMINATION*. Malang: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI .

Irsan, K. (2002). *Risalah Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Kaligis, O. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidna*. Bandung: Bandung : Alumni.

Kawengian, T. A. (2016). PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP. *JURNAL JUSTITIA* , 2-3.

Kuffal. (2008). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Lamintang, P. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis*. Bandung: Sinar Baru.

Lapasi, D. (2016). Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup. *Jurnal LexetSocietatis*, Vol.IV/No. 2/Feb/2016 , 5.

Latif, D. H. (2016). PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA UMUM MENURUT KUHAP. *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar , 5.

Leden, M. (2010). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Maghfira Ramadhina, A. F. (2022). Visum Et Repertum Dakam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 3.

Mertokusumo, S. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muh. Arief Syahroni, M. A. (2019). PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Ilmu Hukum* , 2-4.

Mukhlis, S. M. (2018). *HUKUM PIDANA*. Banda Aceh: Syiah Kuala Univercity Press.

Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Natsir, A. (2013). *Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Nazaruddin, H. D. (2017). Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyelidikan Kepolisian. *Syiah Kuala Law Jurnal* , 6-8.

Ni Nyoman Rina Desi Lestari, A. A. (2023). Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus. *Jurnal Analogi Hukum* , 3.

Nugroho, B. (2002). PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA. *YURIDIKA* , 5-10.

Octavian, V. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 . *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 Nomor 2 Desember 2011* , 15.

Pangaribuan, A. M. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri.

Prodjodikoro, W. (2008). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Purnomo, B. (2004). *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Jogjakarta: Liberti.

Ramadhan, M. Z. (2021). *KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MENAGGIL DAN MEMERIKSA SAKSI A DE CHARGE*. Banjarmasin: Juenal Penegak Hukum Indonesia.

Rampen, D. A. (2018). KEDUDUKAN HUKUM DARI KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PASAL 189 KUHP. *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April* , 6.

Rangkuti, R. (2019). KEKUATAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PROSES. *VOLUME 1* , 2-3.

Rochaeti, N. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , 15.

Rocky Marbun, S. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Malang : SETARA PRESS.

Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.

Rukmini, M. (2007). *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Bandung:Alumni.

Samosir, C. D. (2013). *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* . Bandung: Setara Press.

Sastrawidjaya, S. (2009). *Hukum Pidana I*. Bandung: CV Amico Bandung.

Selang, D. J. (2012). KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI UNTUK PENCARIAN KEBENARAN. *Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012* , 14.

Setiawan, P. A. (2021). PELAKSANAAN SANKSI HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE*).

- Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara. *Jurnal El-Qanuny* , 2.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli dan Vosum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana* . Bandung: Bandung:Bandar Maju.
- Soetama, H. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Soetanto, S. D. (2008). *Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan undang-undang khusus di indonesia*. Surakarta: Yustisia Jurnal Hukum.
- Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Media Group.
- Sudarto. (2010). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.
- Sukarna, K. (2014). Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana. *Prosiding Seminar Nasional* , 8.
- Summaryanto, D. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suparni, N. (2002). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susi, E. (2019). *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP*. Jakarta: Juenal Lex Crimen Vol.VIII/No. 3 Maret/2019.
- Wibowo, D. A. (2011). *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wijaya, F. (2016). REKONSTRUKSI KEADILAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK. *Jurnal Widya* , 4-5.
- Yahya, H. M. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusup Khairun Nisa, J. K. (2015). KEKUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI. *Varia Justicia Vol II No. 1* , 6.